

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Peran dan Fungsi Industri Kecil

1. Pengertian Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donelly peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi. Kemudian menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.

Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan

kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.

- c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan

ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.⁶

2. Cakupan Peran

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemsyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁷

Menurut Veithzal Rivai Peranan di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Miftha Thoha peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecendrungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi

⁶ Syaron Brigitte Lantaeda, dkk, “*Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 04 No. 048, hlm. 2

^{7 7} J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. Ke-3, hlm.159

diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi;
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
- d. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang.

Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Peranan yang diharapkan (excepted roles), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
- b. Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya

lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.

3. Peran Industri Kecil dalam Perekonomian

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Industri Kecil ataupun Usaha kecil memegang peranan penting dalam meningkatkan perekonomian di dalam suatu negara tersebut. Demikian dengan halnya di Indonesia, sejak diterpa badai krisis financial tepatnya pada tahun 1996 silam, masih banyak industri kecil menengah yang hingga saat ini masih mampu bertahan. Meskipun mereka sempat goyang oleh dampak yang ditimbulkan, namun dengan semangat dan jiwa yang kokoh maka mereka secara perlahan-lahan dapat bangkit dari keterpurukan.

Ada tiga alasan utama suatu Negara harus memberikan dorongan bagi usaha kecil ataupun industri kecil untuk terus berkembang. *Alasan pertama* adalah karena pada umumnya usaha kecil ataupun industri kecil sangat cenderung memiliki kinerja yang sangat produktif. Kemudian *alasan kedua*, seringkali mencapai peningkatan produktiitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi, tentunya hali ini merupakan bagian dari dinamika usahanya yang terus menyesuaikan perkembangan zaman. Dan yang terakhir *alasan ketiga*, usaha kecil ternyata mampu memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan besar.

Industri kecil sebenarnya di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga. Perkembangan suatu usaha, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Perkembangan suatu usaha dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu dari faktor internal maupun eksternal. Untuk factor eksternal, ada satu permasalahan yang sering dihadapi oleh para pemilik usaha yaitu permodalan.

Dalam hal ini peran dan fungsi industri kecil sangat besar dalam kegiatan ekonomi di antaranya sebagai berikut:

- a) Memiliki potensi yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja
- b) Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal, memegang peranan utama dalam pengadaan produk dan jasa bagi masyarakat, dan secara langsung menunjang kegiatan usaha yang berskala besar.
- c) Industri kecil relative tidak memiliki utang dalam jumlah besar
- d) Industri kecil memberikan sumbangan sebesar 58,30% dari PDB nasional pada tahun 2003, karena masalah yang dihadapi bangsa Indonesia sat ini adalah tingginya tingkat angka pengangguran.
- e) Akhir-akhir ini peran Industri Kecil diharapkan sebagai salah satu sumber peningkatan ekspor non migas.

Adapun fungsi industri kecil diantaranya sebagai berikut:

- a). Industri kecil dapat memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usaha, seperti fungsi pemasok, produksi, penyalur, dan pemasaran bagi hasil produk-produk industri besar. Industri kecil berfungsi sebagai transformator antar sektor yang mempunyai kaitan ke depan maupun ke belakang.
- b). Industri kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada. Industri kecil sangat fleksibel karena dapat menyerap tenaga kerja dan sumber daya lokal serta menggambarkan sumber daya lokal serta meningkatkan sumber daya manusia agar dapat menjadi wirausaha yang tangguh.
- c). Industri kecil dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional, alat pemerataan berusaha dan pendapatan, karena jumlahnya tersebar diperkotaan maupundi pedesaan.⁸

Upaya untuk meningkatkan penjualan, para perajin industri kecil perlu memperhatikan aspek pemasaran. Pemasaran produk secara langsung ataupun lewat perantara sebaiknya dioptimalkan. Upaya sebagian kecil perajin industri kecil yang sudah mempromosikan kreatifitas mereka lewat jaringan internet perlu diikuti oleh perajin industri kecil yang lain.

Dalam hal ini perajin industri kecil dapat bekerja sama dengan paguyuban untuk mengusahakan bantuan dari pemerintah ataupun

⁸ Suryana, *kewirausahaan Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Salemba EMpat, 2006), hlm. 77

lembaga-lembaga swasta yang *concern* terhadap perkembangan industri kecil agar memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas, pelatihan Teknologi Informasi (TI) ataupun pendamping. Dengan demikian diharapkan cakupan promosi lebih luas dan efektif sehingga usaha para perajin dapat lebih berkembang.⁹

B. Tinjauan Tentang Industri Kecil

1. Pengertian Industri Kecil

Menurut Biro Pusat Statistik, mendefinisikan industri kecil merupakan kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan juga hanya memiliki tenaga kerja sebanyak 5-19 orang.

Industri kecil dalam perkembangannya membawa misi pemerataan yaitu dengan penyebaran kegiatan usaha, peningkatan partisipasi bagi golongan ekonomi lemah, perluasan kesempatan kerja dengan pemanfaatan potensi ekonomi terbatas. Dalam rangka menunjang pembangunan daerah, maka pengembangan industri kecil seperti sentra industri, lingkungan industri, mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai pusat-pusat pertumbuhan industri yaitu:

- a. Sebagai pusat pembinaan dan penyuluhan termasuk bantuan bahan baku dan pemasaran.

⁹ <http://lonyoknyokq.blogspot.com/2010/11/peranan-industri-kecil-terhadap.html> diakses pada tanggal 3 September 2020mmmm

- b. Sebagai tempat pelengkap peralatan yang dapat dipergunakan bersama untuk suatu wilayah guna menyempurnakan produk
- c. Sebagai sarana kerja untuk sejumlah terbatas pengusaha industri kecil menurut Syahrudin.

Di Indonesia Industri diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan dalam skala usahanya menurut Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 590 tahun 1999 yaitu industri berskala besar, sedang dan kecil dengan melihat besarnya investasi, mesin atau peralatan yang dinamakan pada perusahaannya dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Industri besar, diatas Rp. 5.000.000.000,00
- b. Industri sedang, Rp. 200.000.000,00 sampai Rp. 5.000.000.000,00
- c. Industri kecil dibawah Rp. 200.000.000,00

Sedangkan menurut kantor Biro Pusat Statistik bahwa klasifikasi industri didasarkan atas jumlah karyawan yang yang dipekerjakan, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Industri besar, memiliki karyawan lebih dari 100 orang
- b. Industri sedang, memiliki karyawan 20 orang sampai 100 orang
- c. Industri kecil, memiliki karyawan 5 orang sampai 19 orang

Menurut Irsan industri kecil di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan eksistensinya kedalam tiga kelompok kategori, yaitu *Pertama* industri lokal adalah kelompok industri yang menggantungkan kelangsungan hidupnya kepada pasar setempat yang terbatas serta relatif tersebar dari segi lokasinya. Skala usaha kelompok

ini umumnya terbatas sehingga sarana transportasinya juga sederhana, seperti sepeda, gerobak, atau pikulan. *Kedua* Industri Sentra adalah kelompok jenis industri dari segi satuan usaha mempunyai skala kecil, tetapi membentuk suatu pegelompokan atau kawasan industri terdiri dari kumpulan unit-unit yang menghasilkan barang sejenis. Ditinjau dari segi tempat pemasarannya, kategori jenis industri sentra lebih luas dibandingkan jenis lokal. *Ketiga* Industri Mandiri adalah kelompok jenis industri kecil namun dalam pengolahan produknya mampu mengadaptasikan teknologi yang cukup canggih. Sedangkan target pemasarannya lebih luas dibandingkan dengan kedua industri kecil lainnya.¹⁰

Sedangkan menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mendefinisikan industri kecil sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, yang mempunyai tujuan untuk memproduksi barang maupun jasa untuk diperdagangkan secara komersial, yang mempunyai nilai penjualan pertahunnya kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,00.¹¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa industri kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha

¹⁰ Rahel Widiawati Kimbal, *Modal Sosial Dan Ekonomi Industri Kecil Sebuah Studi Kualitatif*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2015, hlm. 38-41

¹¹ Andri Ratnasari, "Peranan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Tulungagung", *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 1, No. 3 Juli 2015, hlm. 5

menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

2. Jenis-jenis Barang Industri Kecil

Menurut Djumiati, berdasarkan jenis barang-barang yang dihasilkan, industri kecil dapat digolongkan menjadi empat bagian yaitu:

- a. Industri kecil yang mempunyai kaitan dengan industri menengah dan besar seperti industri-industri di bawah ini:
 - a) Industri kecil yang menghasilkan barang-barang yang diperlukan oleh industri menengah dan besar
 - b) Industri kecil yang memerlukan produk-produk dari industri menengah dan besar baik sebagai bahan baku, maupun sebagai bahan-bahan limbah dari industri menengah dan besar untuk dipergunakan sebagai bahan baku.
- b. Industri kecil yang berdiri sendiri ialah industri kecil yang menghasilkan barang-barang langsung dipakai oleh konsumen (*consumen's goods*). Industri kecil ini tidak mempunyai kaitan dengan industri lain, misalnya industri kecil di bidang pembuatan kompor, pompa air, kran saluran air minum, tegel, genteng, semen rakyat dan sebagainya.
- c. Industri kecil penghasil barang-barang seni adalah:

- a) Industri yang menghasilkan barang-barang seni yang disebut *ort products*, misalnya kegiatan yang menghasilkan lukisan, patung, pembuatan keris, dan lain sebagainya.
 - b) Industri kecil yang menghasilkan barang-barang atas dasar ketrampilan yang berkembang dalam masyarakat yang disebut *craft products*, seperti industri kecil yang menghasilkan kain batik, tenun ikat, kerajinan perak, kuningan, batu tanduk, anyaman rotan, anyaman bambu, dan lain-lain.
- d. Industri kecil mempunyai pasaran lokal serta bersifat pedesaan adalah industri yang menghasilkan barang-barang yang jangkauan pemasarannya bersifat pedesaan dan masih terbatas, misalnya:
- a) Industri kecil dibidang makanan, pada umumnya masih dalam rangka pemenuhan kebutuhan lokal, antara lain: tahu, krupuk, roti dan lain sebagainya
 - b) Industri yang bersifat pelayanan di masyarakat, antara lain: pandai besi, pertukangan dan lain sebagainya.

Selain pergolongan industri berdasarkan jenis barang yang dihasilkan, dalam menentukan apakah industri itu termasuk dalam industri kecil atau tidak, maka criteria fisik industri maupun nonfisik sebagaimana dijelaskan terdahulu sangat berperan. Sedangkan industri kerajinan rumah tangga yang merupakan

bagian daripada industri kecil, mempunyai kriteria sebagai berikut::

- a. Investasi modal untuk mesin-mesin dan peralatan di bawah Rp 500.000,00
- b. Tidak mempunyai ijin usaha.¹²

3. Manfaat Industri Kecil

Adapun manfaat dari industri kecil bagi masyarakat, khususnya golongan ekonomi lemah. Karena sebagian besar pelaku golongan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan lapangan kerja pada penduduk yang umumnya tidak bekerja.
- b. Memberikan tambahan pendapatan tidak saja bagi pekerja atau kepentingan keluarga, tetapi juga anggota anggota keluarga lainnya.
- c. Mampu memproduksi barang-barang keperluan penduduk setempat dan daerah sekitarnya secara lebih efisien dan lebih murah dibanding industri besar.

Selain itu, industri juga mempunyai kedudukan yang penting dalam sektor perekonomian yaitu memberikan manfaat dari segi social yang sangat berperan aktif dalam perekonomian. Berikut manfaat lain industri kecil bagi perekonomian:

- a. Menciptakan peluang usaha yang luas namun dengan pembiayaan yang relatif murah.

¹² Ibid, *Modal Sosial Dan Ekonomi Industri Kecil Sebuah Studi Kualitatif*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2015, hlm. 42-43

- b. Mengambil peranan dalam peningkatan usaha dan mobilisasi tabungan domestik
- c. Mempunyai kedudukan komplementer terhadap industri besar dan sedang.
- d. Mendorong munculnya kewirausahaan domestik sekaligus menghemat sumber daya negara
- e. Menggunakan teknologi padat karya karyawannya dibandingkan yang disediakan oleh perusahaan berskala besar.
- f. Mendorong proses desentralisasi inter regional dan intra regional, karena usaha industri kecil dapat berlokasi di kota-kota dan pedesaan.

4. Kriteria Industri Kecil

Kriteria industri kecil menurut UU RI No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil pasal 5 ayat 1 yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar 1.000.000.000,00
- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha besar
- d. Milik warga Negara Indonesia

- e. Berbentuk orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Kriteria Industri Kecil diidentikkan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Dilihat dari segi ekonomi dan pasar, sering mengalami kesulitan untuk bisa menembus pasar yang lebih luas karena tidak standarnya produk dibandingkan dengan produk industri besar
- b. Dari segi sarana dan teknologi menggunakan teknologi yang sangat terbatas dan sering kali *out of date*, mudah diungguli pesaing dan mengalami kesulitan manajerial dan financial dalam proses pengembangan teknologi
- c. Dari segi system produksi, mempunyai system produksi yang sangat rendah, seringkali menggantungkan diri kepada pekerja keluarga yang tidak dibayar dan sulit mengembangkan desain dari sebuah produknya.
- d. Dari segi capital, industri kecil merupakan industri yang nilai kapitalnya relatif kecil, lambat melakukan ekspansi, tidak tahan dumping dan modal sering dipakai untuk kebutuhan rumah tangga.
- e. Dari segi manajemen, industri kecil merupakan industri yang rentan terhadap pesaing, pasif dan tanpa integrasi dan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan control.
- f. Dari segi personil, industri merupakan industri yang sering dilakukakn secara mandiri (*self employment*), tidak menuntut

sebuah keterampilan yang lebih tinggi, lemah latar belakang bisnis maupun masalah latar belakang akademisnya, dan kurang wawasan perkembangan di luar.

Berikut ini uraian karakteristik tentang industri kecil yang sering dijumpai masyarakat, sebagai berikut:

- a. Pemilik merangkap manajer perusahaan yang bekerja sendiri dan memiliki gaya manajemen sendiri (merangkap semua fungsi manajerial seperti *marketing*, *finance*, dan administrasi).
- b. Perusahaan keluarga, dimana pengelolanya mungkin tidak memiliki keahlian manajerial yang handai.
- c. Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, sumberdaya baru serta barang dan jasa-jasa baru.
- d. Resiko usaha menjadi beban pemilik.
- e. Pertumbuhan yang lambat, tidak teratur, terkadang cepat dan *premature*.
- f. Fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak memiliki rencana jangka panjang.
- g. Independen dalam penentuan harga produksi atas barang atau jasa-jasanya.
- h. Prosedur hukumnya sederhana.
- i. Pajak relative ringan, karena yang dikenakan pajak adalah pribadi/pengusaha bukan perusahaannya.
- j. Komunikasi dengan pihak luar bersifat pribadi.
- k. Mudah dalam proses pendiriannya.

- l. Mudah dibubarkan setiap saat jika dikehendaki.
- m. Pemilik mengelola secara mandiri dan bebas waktu.
- n. Pemilik menerima seluruh laba.
- o. Umumnya mempunyai kecenderungan mampu untuk service.
- p. Merupakan tipe usaha yang paling cocok untuk mengelola produk, jasa, atau proyek perintisan yang sama sekali baru atau belum pernah ada yang mencobanya sehingga sedikit pesaing.
- q. Terbukanya peluang dengan adanya berbagai kemudahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah yang mendukung berkembangnya usaha kecil di Indonesia.
- r. Relative tidak membutuhkan investasi yang terlalu besar, tenaga kerja yang tidak berpendidikan tinggi, serta sarana produksi lainnya yang tidak terlalu mahal.¹³

5. Kekuatan dan Kelemahan Industri Kecil

Industri kecil memiliki segi-segi lemah dan segi-segi lebih. Berikut ini akan dipaparkan kelebihan dan kelemahan industri kecil.

a. Kelebihan Industri Kecil

Industri kecil pada kenyataannya mampu bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang diakibatkan inflasi maupun berbagai faktor penyebab lainnya. Tanpa subsidi maupun *proteksi*, industri kecil maupun menambah nilai devisa negara khususnya industri kecil di sektor informal dan

¹³ Martin Perry, *Mengembangkan Usaha Kecil*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 54

mampu berperan sebagai penyangga dalam perekonomian masyarakat kecil/lapisan bawah.

Disamping itu, industri kecil juga memiliki nilai strategis bagi perkembangan perekonomian Negara kita, antara lain sebagai berikut:

- 1) Banyaknya produk-produk tertentu yang dikerjakan oleh perusahaan kecil. Perusahaan besar dan menengah banyak ketergantungan kepada perusahaan kecil, karena jika hanya dikerjakan perusahaan besar dan menengah, marginnya menjadi tidak ekonomis.
- 2). Merupakan pemerataan konsentrasi dari kekuatan-kekuatan ekonomi dalam masyarakat.

Secara umum perusahaan dalam skala kecil baik usaha perseorangan maupun persekutuan (kerja sama) memiliki kelebihan dan daya tarik. Kelebihan dan daya tarik tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik merangkap manajer perusahaan dan merangkap semua fungsi manajerial seperti marketing, *finance*, dan administrasi.
- 2) Dalam pengelolaannya mungkin tidak memiliki keahlian manajerial yang handal.
- 3) Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, sumber daya baru serta barang dan jasa-jasa baru.

- 4) Risiko usaha menjadi beban pemilik.
- 5) Pertumbuhannya lambat, tidak teratur, tetapi kadang-kadang terlalu cepat dan bahkan premature.
- 6) Fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak memiliki rencana jangka panjang.
- 7) Bebas menentukan harga produksi atas barang dan jasa.
- 8) Prosedur hukumnya sederhana.
- 9) Pajak relative ringan, karena yang dikenakan pajak adalah pribadi/pengusaha, bukan perusahaannya.
- 10) Komunikasi dengan pihak luar bersifat pribadi.
- 11) Mudah dibubarkan setiap saat jika dikehendaki.
- 12) Mudah dalam proses pendiriannya.
- 13) Pemilik mengelola secara mandiri dan bebas waktu
- 14) Pemilik menerima seluruh laba
- 15) Umumnya mampu untuk *survive*
- 16) Cocok untuk mengelola produk, jasa atau proyek perintisan yang sama sekali baru, atau belum pernah ada yang mencobanya, sehingga memiliki sedikit pesaing.
- 17) Memberikan peluang dan kemudahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah demi berkembangnya industri kecil. Diversifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktu

dan pasar konsumen senantiasa tergal melalui kreativitas pengelola.

18) Relatif tidak membutuhkan investasi terlalu besar, tenaga kerja tidak berpendidikan tinggi, dan sarana produksi lainnya relative tidak terlalu mahal.

19) Mempunyai ketergantungan secara moril dan semangat usaha dengan pengusaha kecil lainnya.

b. Kelemahan Pengelolaan Industri Kecil

Kelemahan dan hambatan dalam pengelolaan industri kecil umumnya berkaitan dengan *faktor intern* dari industri kecil itu sendiri. Kelemahan dan hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, utang yang tidak bermanfaat, tidak mematuhi ketentuan pembukuan standar.
- 2) Pembagian kerja yang tidak proporsional, dan karyawan sering bekerja diluar batas jam kerja standar.
- 3) Tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja karena tidak adanya perencanaan kas.
- 4) Persediaan barang terlalu banyak sehingga beberapa jenis barang ada yang kurang laku.
- 5) Sering terjadi mist-manajemen dan ketidakpedulian pengelolaan terhadap prinsip-prinsip manajerial.
- 6) Sumber modal yang terbatas pada kemampuan pemilik.

- 7) Perencanaan dan program pengendalian sering tidak ada atau belum pernah merumuskan.

Adapun yang menyangkut *faktor ekstern* antara lain:

- 1) Risiko dan utang-utang kepada pihak ketiga ditanggung oleh kekayaan pribadi pemilik
- 2) Sering kekurangan informasi bisnis, hanya mengacu pada intuisi dan ambisi pengelola, serta lemah dalam promosi
- 3) Tidak pernah melakukan studi kelayakan, penelitian pasar dan analisis perputaran uang tunai.¹⁴

6. Manfaat Industri Kecil

Adapun manfaat dari industri kecil bagi masyarakat, khususnya golongan ekonomi lemah. Karena sebagian besar pelaku golongan tersebut yaitu sebagai berikut:

- d. Memberikan lapangan kerja pada penduduk yang umumnya tidak bekerja.
- e. Memberikan tambahan pendapatan tidak saja bagi pekerja atau kepentingan keluarga, tetapi juga anggota anggota keluarga lainnya.
- f. Mampu memproduksi barang-barang keperluan penduduk setempat dan daerah sekitarnya secara lebih efisien dan lebih murah dibanding industri besar.

¹⁴ M.Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 27

Selain itu, industri juga mempunyai kedudukan yang penting dalam sektor perekonomian yaitu memberikan manfaat dari segi social yang sangat berperan aktif dalam perekonomian. Berikut manfaat lain industri kecil bagi perekonomian:

- a. Menciptakan peluang usaha yang luas namun dengan pembiayaan yang relatif murah.
- b. Mengambil peranan dalam peningkatan usaha dan mobilisasi tabungan domestic.
- c. Mempunyai kedudukan komplementer terhadap industri besar dan sedang.
- d. Mendorong munculnya kewirausahaan domestic sekaligus menghemat sumber daya Negara.
- e. Menggunakan teknologi padat karya karyawannya dibandingkan yang disediakan oleh perusahaan berskala besar.
- f. Mendorong proses desentralisasi inter regional dan intra regional, karena usaha industri kecil dapat berlokasi di kotaa-kota dan pedesaan.

7. Kriteria Industri Kecil

Kriteria industri kecil menurut UU RI No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil pasal 5 ayat 1 yaitu sebagai berikut:

- f. Memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- g. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar 1.000.000.000,00

- h. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha besar
- i. Milik warga Negara Indonesia
- j. Berbentuk orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.¹⁵

Kriteria Industri Kecil diidentikkan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- g. Dilihat dari segi ekonomi dan pasar, sering menjalani kesulitan untuk bisa menembus pasar yang lebih luas karena tidak standarnya produk dibandingkan dengan produk industri besar
- h. Dari segi sarana dan teknologi menggunakan teknologi yang sangat terbatas dan sering kali *out of date*, mudah diungguli pesaing dan menjalani kesulitan manajerial dan financial dalam proses pengembangan teknologi
- i. Dari segi system produksi, mempunyai system produksi yang sangat rendah, seringkali menggantungkan diri kepada pekerja keluarga yang tidak dibayar dan sulit mengembangkan desain dari sebuah produknya.
- j. Dari segi capital, industri kecil merupakan industri yang nilai kapitalnya relatif kecil, lambat melakukan ekspansi, tidak tahan dumping dan modal sering dipakai untuk kebutuhan rumah tangga.

¹⁵ Martin Perry, *Mengembangkan Usaha Kecil*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 52

- k. Dari segi manajemen, industri kecil merupakan industri yang rentan terhadap pesaing, pasif dan tanpa integrasi dan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan control.
- l. Dari segi personil, industri merupakan industri yang sering dilakukakn secara mandiri (*self employment*), tidak menuntut sebuah keterampilan yang lebih tinggi, lemah latar belakang bisnis maupun masalah latar belakang akademisnya, dan kurang wawasan perkembangan di luar.¹⁶

c. Kelemahan Pengelolaan Industri Kecil

Kelemahan dan hambatan dalam pengelolaan industri kecil umumnya berkaitan dengan *faktor intern* dari industri kecil itu sendiri. Kelemahan dan hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, utang yang tidak bermanfaat, tidak mematuhi ketentuan pembukuan standar.
- 2) Pembagian kerja yang tidak proporsional, dan karyawan sering bekerja diluar batas jam kerja standar.
- 3) Tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja karena tidak adanya perencanaan kas.
- 4) Persediaan barang terlalu banyak sehingga beberapa jenis barang ada yang kurang laku.

¹⁶ Sartini Pawe, *Peranan Industri Rumah Tangga Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Desa Roworena Kec. Ende Selatan Kab. Ende*, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Malang, 2007, hlm. 16

- 5) Sering terjadi mist-manajemen dan ketidakpedulian pengelolaan terhadap prinsip-prinsip manajerial.
- 6) Sumber modal yang terbatas pada kemampuan pemilik.
- 7) Perencanaan dan program pengendalian sering tidak ada atau belum pernah merumuskan.

Adapun yang menyangkut *faktor ekstern* antara lain:

- 1) Risiko dan utang-utang kepada pihak ketiga ditanggung oleh kekayaan pribadi pemilik
- 2) Sering kekurangan informasi bisnis, hanya mengacu pada intuisi dan ambisi pengelola, serta lemah dalam promosi
- 3) Tidak pernah melakukan studi kelayakan, penelitian pasar dan analisis perputaran uang tunai.¹⁷

8. Manajemen dalam Industri Kecil

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan dalam industri kecil manajemen pengelolaan sangatlah penting karena dapat mendukung kelancaran industri tersebut. Manajemen pengelolaan diantaranya sebagai berikut:

¹⁷ Ibid, *Membuka Usaha Kecil*, hlm. 27

a) Permodalan

Setiap kegiatan usaha baik profit atau non profit senantiasa membutuhkan dana untuk modal yang digunakan untuk membelanjai dan menjalankan usahanya. Pada umumnya, dana atau modal yang dimiliki suatu industri digunakan untuk membiayai operasional kegiatan misalnya untuk membeli bahan dasar, bahan pembantu, membayar gaji para karyawan dan lain sebagainya. Dengan harapan melalui penjualan, perusahaan akan dapat memperoleh kembali dana yang telah dikeluarkan. Adapun modal dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Menurut waktu pengeluaran modal

- Modal investasi adalah modal yang digunakan dalam jangka panjang, namun dapat dipakai secara berulang kali. Biasanya dilakukan pada awal pendirian usaha tersebut. Seperti modal berupa tanah, bangunan, mesin, ataupun peralatan.
- Modal adalah modal yang akan digunakan untuk melakukan pendanaan terhadap biaya operasional dari usaha yang dijalankan. Modal ini akan

digunakan dalam jangka waktu yang lebih pendek.

2) Menurut Sumber Dana

- Modal sendiri, modal didapatkan dari pendanaan yang diperoleh dari diri sendiri. Misalnya pihak pelaku usaha mendapatkan modal dari harta kekayaan sendiri.
- Modal dari luar, modal dari luar ini diperoleh dari pihak luar dan bukan dari diri sendiri ataupun dari si pemilik usaha, biasanya modal tersebut didapat dari bank, kerabat dekat, atau rekan bisnis.¹⁸

b) Produksi

Produksi merupakan suatu kegiatan mengenai pembuatan produk baik berupa fisik maupun berwujud jasa. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa produksi adalah proses yang berkenaan dengan pengubahan bahan baku atau bahan dasar menjadi barang atau jasa.

c) Pemasaran

Pemasaran merupakan suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan dan

¹⁸ John Soeprihanto, *Manajemen Modal Kerja*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1997), hlm. 9

mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial.¹⁹

Didalam pemasaran ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan diantaranya sebagai berikut:

1) Memilih tujuan menetapkan harga

Pertama-tama industri tersebut memutuskan dimana ingin memposisikan tawaran pasarnya. Semakin jelas tujuan suatu industri maka akan semakin mudah untuk menetapkan harga.

2) Menentukan permintaan

Setiap harga akan menghasilkan tingkat permintaan yang berbedadad hal ini mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap tujuan pemasaran suatu industri.

3) Memperkirakan biaya

Permintaan menentukan batas harga tertinggi yang dapat dikenakan suatu industri untuk produknya. Biaya menentukan batas terendahnya. Industri tersebut ingin menetapkan harga yang menutupi biaya produksi, distribusi, dan penjualan produk, termasuk laba yang lumayan untuk upaya dan resikonya.²⁰

¹⁹ Willian J. Stanton, *Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 7

²⁰ Kotler dan Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Indeks, 2007), hlm.84

C. Tinjauan Tentang Perekonomian Masyarakat

1. Pengertian Perekonomian Masyarakat

Peningkatan berarti kemajuan perubahan perbaikan. Sedangkan perekonomian mempunyai kata dasar “Oikos” yang berarti rumah tangga dan “Nomos” yang berarti aturan jadi ekonomi mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam satu rumah tangga.²¹ Jadi, ekonomi berarti ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian dan perdagangan). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian merupakan suatu perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah menjadi perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.

Perekonomian masyarakat merupakan sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya.²² Arti dari peningkatan perekonomian ini adalah perbaikan jenjang perekonomian melalui usaha mandiri yang produktif dengan manajemen dalam usahanya.

Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah

²¹ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 1

²² Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1997), hlm. 85

pemberdayaan pelaku ekonomi usaha kecil. Kedua, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis disebut pembangunan partisipatif (*participatory development*). Berdasarkan pendekatan yang kedua ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan memiliki tujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembangunan. Hal ini mempunyai makna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan. Pendekatan kedua ini, sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan.²³

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kerakyatan merupakan perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat.

2. Strategi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan yaitu sebuah perekonomian yang dimiliki oleh rakyat kecil dan didominasi oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berarti mengembangkan system ekonomi yang berasas dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

²³ Fachri Yasin dkk, *Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, (Pekanbaru: Unri Perss, 2002), hlm. 2-3

Membangun ekonomi rakyat harus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendominasi potensinya, atau memberdayakannya.

Ada beberapa langkah atau strategi yang harus diperhatikan dalam merealisasikan atau mengembangkan ekonomi kerakyatan agar tujuan tersebut terlaksana dengan baik yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi terhadap perilaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil, petani dan kelompok tani mengenai potensi dan pengembangan usahanya.
- b. Melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendamping.
- c. Program pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha.
- d. Melakukan koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi.²⁴

3. Prinsip – Prinsip Ekonomi Kerakyatan

Secara umum pakar ekonomi belum menyebutkan suatu prinsip yang utuh yang menyangkut dengan ekonomi rakyat. Akan tetapi tertuang dalam UUD 1945 terutama pasal 33 adalah sebagai berikut:

²⁴Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat :Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003), hlm. 9-10

- a. Prinsip kekeluargaan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini merupakan acuan semua badan usaha baik BUMN, BUMS dan BUMD.
- b. Prinsip kedilan, pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa mewujudkan keadilan dalam masyarakat. System ini diharapkan dapat memberikan peluang yang sama kepada semua anak bangsa baik itu konsumen, pengusaha, maupun sebagai tenaga kerja.
- c. Prinsip pemerataan pendapatan, masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus merasakan pemerataan pendapatan.
- d. Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan adanya sinergi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.
- e. Prinsip kerjasama atau jaringan, dalam prinsip ini para pelaku ekonomi harus saling membantu dan bekerja sama, dengan bekerjasama tentu berbagai kegiatan usaha kecil akan menjadi kuat dan besar.

D. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Beberapa definisi dan pengertian mengenai ekonomi Islam, diantara sebagai berikut:

Menurut SM. Hasanuzzaman: Ekonomi Islam adalah pengetahuan tentang penerapan perintah-perintah (*injuctions*), dan tata

cara (*rules*) yang ditetapkan oleh syari'ah, dalam rangka mencegah ketidak-Adilan dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka memenuhi kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat.

Haidar NAqvi: Ekonomi Islam `merupakan` sebuah aksioma etika, yang meliputi (1) Tauhid, (2) Keseimbangan, (3) Kehendak Bebas dan (4) Pertanggung-Jawaban. Empat aksioma inilah yang *inheren* sejalan dengan perkembangan manusia dalam kehidupan dunia. Perspektif semacam ini, dengan demikian memberikan legitimasi dan kekuatan 'power' bagi eksistensi Islam di ranah praktik social ekonomi.

Nejatullah Siddiqie: Ekonomi Islam hanya sebagai tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya di mana dalam upaya ini mereka dibantu oleh al-Qur'an dan Sunnah yang disertai dengan argumentasi dan pengalaman yang empiris.

Abdul Mannan: Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang berazaskan norma, dan nilai-nilai Islam.

Yusuf Qhardawi: mengatakan, bahwa ekonomi adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan. Ia terpancar akidah ketuhanan, akidah tauhid.²⁵

M. Umer Chaptra: ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang terbatas, yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu ataupun tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.

Ekonomi Islam merupakan suatu konsep atau teori yang dikembangkan berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Sedangkan secara luas, ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara actual dan empiris, baik dalam aspek produksi, distribusi maupun konsumsi berlandaskan syariat Islam yang

²⁵ Mashur, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2020), hlm. 85 Mashur, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2020), hlm. 85

bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.²⁶

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulannya bahwa ekonomi Islam menerapkan suatu perilaku individu dalam kegiatan ekonominya harus sesuai dengan syari'at dan tuntutan yang berlaku dalam Islam untuk mewujudkan dan menjaga *maqasyid syari'ah* (agama, jiwa, akal, nasab dan harta).

2. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.

Menjaga kemaslahatan bisa dengan cara *min haytsu al-wujud* dan *min haytsu al-wujud* dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan. Misalnya ketika seseorang memasuki sektor industri, ia harus selalu mempersiapkan beberapa strategi agar bisnisnya bisa berhasil mendapatkan profit dan *benefit* dengan baik, sehingga akan membawa kebaikan bagi banyak pihak. Dan, menjaga kemaslahatan *min haytsu al-adam* adalah dengan cara memerangi segala hal yang bisa

²⁶ Umer Chaptra, *Ekonomi Dan Tantangan Ekonomi: Islam Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm

menghambat jalannya kemaslahatan itu sendiri. Misalnya, ketika seseorang memasuki sektor industri, ia harus mempertimbangkan beberapa hal yang bisa menyebabkan bisnis tersebut bangkrut. Misalnya dengan tegas mengeluarkan para pekerja yang melakukan berbagai macam kecurangan ataupun menghindari beberapa perilaku korupsi.²⁷

3. Ciri-ciri Ekonomi Islam

Naqvi mengemukakan bahwa terdapat lima hal yang membentuk system ekonomi Islam dan menjadi ciri-ciri Islam.

Pertama, kepemilikan faktor-faktor produksi. Dalam sistem ekonomi Islam, pemilikan perorangan atas faktor-faktor produksi berlaku, namun karena pemilikan tersebut merupakan amanah Allah SWT, maka pemanfaatannya haruslah sesuai dengan kehendak pemberi amanah. Dalam hal kewarisan kekayaan pribadi, sepertiga dari harta kekayaan seseorang dapat diberikan kepada yang bukan anggota keluarga menunjukkan dorongan untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih luas, terutama kepada kaum miskin, mereka yang membutuhkan, dan mereka yang tertindas. Tidak ada ketentuan mengenai siapa yang boleh menerima bagian yang sepertiga itu, dan jika si pemilik harta ingin memberikannya kepada seorang kaya, maka ia memiliki hak untuk itu.

Kedua, sistem rangsangan. Rangsangan spiritual dan moral adalah yang bekerja dalam sistem ekonomi Islam. Kemampuan material bisa

²⁷ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 12

menyertai usaha individual, bisa juga tidak menyertainya. Kemajuan materiel, kemajuan duniawi, dan jumlah harta yang membesar bukan ukuran keberhasilan seorang. Sebaliknya, ada kekhawatiran bahwa kemajuan materiel membuat orang menjadi lupa diri.

Ketiga, alokasi sumber daya dan pembuatan keputusan negara. Dalam ekonomi Islam, Negara memiliki peranan menentukan untuk menanggulangi fakir miskin dan orang-orang terlantar. Peranan Negara yang besar dalam perekonomian Islam secara logis berasal dari pengakuan islam yang eksplisit tentang apa yang akan dilakukan individu untuk kemajuan masyarakat. Kontrol Negara dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung. Kontrol langsung berupa pengaturan investasi, kebijakan distribusi pendapatan, produksi barang kebutuhan pokok dan nasionalisasi bank-bank. Kontrol tidak langsung mencakup kebijakan fiskal, moneter, pajak, dan pengeluaran pemerintah.

Keempat, jaminan social dan progam penanggulangan kemiskinan. Perhatian Islam yang begitu kuat terhadap fakir miskin menuntut Negara untuk menyediakan kebutuhan dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang layak. Pentingnya menegakkan keadilan sosial mengharuskan Negara mengambil kebijakan pemerataan manfaat (*utility equalization*) antar-individu. Hal itu berate harus dilakukan dengan penurunan tingkat pendapatan golongan atas secara substansial dan meningkatkan pendapatan golongan bawah, sehingga yang mengharuskan tidak hanya penyamaan pendapatan melainkan juga konsumsi.

Kelima, penghapusan riba dan implemementasi zakat. Penghapusan riba tidak hanya sekadar perekonomian bebas bunga, tetapi lebih dari itu yaitu perekonomian bebas eksploitasi. Adapun zakat merupakan instrument kebijakan yang sah, yang tujuannya adalah mendistribusikan kekayaan kepada kelompok fakir miskin. Oleh karena itu, hasil pemungutan zakat pasti tidak mencukupi, maka pajak lain dapat dan harus dipungut.²⁸

4. Keunggulan Ekonomi Islam

Beberapa asumsi dasar dalam ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Mannan, sebagai berikut:

Pertama, Mannan tidak percaya kepada *“harmony of interests”* yang terbentuk oleh mekanisme pasar seperti teori Adam Smith. Sejatinya *harmony of interests* hanyalah angan-angan yang utopis karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai naluri untuk menguasai pada yang lain. Hawa nafsu ini jika tidak dikendalikan, maka akan cenderung merugikan pada yang lain. Begitulah kehidupan kapitalistik yang saat ini tengah terjadi, dimana kepentingan pihak-pihak yang kuat secara faktor produksi dan kekuasaan mendominasi percaturan kehidupan. Mannan menekankan pada perlunya beberapa jenis intervensi pasar. Dari sini dapat dipahami bahwa manusia secara pribadi tidak bisa menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Dalam hal ini, ekonomi Islam diharapkan akan bekerja pada perpotongan antara mekanisme pasar dan perencanaan terpusat.

²⁸ Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 127

Kedua, penolakannya pada Marxis. Teori perubahan Marxis tidak akan mengarah pada perubahan yang lebih baik. Teori Marxis hanyalah reaksi dari kapitalisme yang jika ditarik garis merah tidak lebih dari solusi yang tidak tuntas. Bahkan, lebih jauh teori Marxis ini cenderung tidak manusiawi karena mengabaikan naluri manusia yang fitrah, dimana manusia mempunyai kelebihan antara satu dan lainnya dan itu perlu mendapatkan *reward* yang berarti. Dia berpendapat bahwa, hanya ekonomi Islam yang dapat memberikan perubahan yang lebih baik. Alasan utama Mannan adalah karena ekonomi Islam memiliki nilai-nilai etika dan kemampuan motivasional. Tetapi, Mannan tidak menjelaskan perbedaan nilai etika Islam dan kemampuan motivasional tersebut dengan nilai-nilai Marxis beserta motivasinya.

Ketiga, Mannan menyebarkan gagasan perlunya melepaskan diri dari paradigma aum neoklasik positivis, dengan menyatakan bahwa observasi harus ditunjukkan kepada data historis dan wahyu. Argument ini sebenarnya bertolak belakang dari agumennya sendiri untuk meninggalkan paradigma kaum neoklasik yang mendasarkan pada historis. Hanya saja, Mannan lebih jauh menampilkan “wahyu” sebagai penunjukkan dan pelengkap dalam arah observasi. Jadi, Mannan sangat menaruh perhatian pada norma wahyu dalam setiap observasi ekonominya.

Keempat, Mannan menolak gagasan kekuasaan produsen atau kekuasaan konsumen. Hal tersebut menurutnya akan memunculkan

dominasi dan eksploitasi. Dalam pernyataan, sistem kapitalistik yang ada saat ini dikotomi kekuasaan produsen kekuasaan konsumen tak terhindarkan. Dalam konteks ini, Mannan mengusulkan perlunya keseimbangan antara control pemerintah dan persaingan dengan menjunjung nilai-nilai dan norma-norma sepanjang diizinkan oleh syariah. Hanya saja, mekanisme control dengan upaya menjunjung nilai-nilai norma yang sesuai dengan syariah belum dijabarkan dengan baik. Artinya, mekanisme ini akan sangat beragam sesuai dengan persepsi dan sistem kekuasaan yang ada di tiap-tiap Negara.

Kelima, dalam hal pemilikan individu dan swasta, Mannan berpendapat bahwa Islam mengizinkan pemilikan swasta sepanjang tunduk pada kewajiban moral dan etik. Dia menambahkan bahwa semua bagian masyarakat harus memiliki hak untuk mendapatkan bagian dalam harta secara keseluruhan. Namun setiap individu tidak boleh dengan cara mengeksploitasi pihak lain.

Keenam, dalam mengembangkan ilmu ekonomi islam, langkah pertama Mannan adalah menentukan *basic economy functions* yang secara sederhana meliputi, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Ada prinsip dasar yang berakar pada syariah untuk *basic economy functions* berupa fungsi konsumsi, yakni prinsip *righteousness, cleanliness, moderation, beneficence, morality*. Perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh kebutuhannya sendiri yang secara umum

adalah kebutuhan manusia yang terdiri dari *necessities*, *comforts*, dan *luxuries* menurut Haneef, Yuliadi, dan Hulwati.²⁹

5. Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Qur'an dan hadits yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (*al-Falah*).

Beberapa prinsip dalam sistem ekonomi Islam diantaranya sebagai berikut:

- a) Allah menentukan benar dan salah
- b) Prinsip penggunaan
- c) Prinsip pertengahan
- d) Kebebasan ekonomi
- e) Prinsip keadilan

Dengan cakupan dasar yang terkandung dalam ekonomi Islam tersebut, maka konfigurasi ekonomi Islam diibaratkan sebagai bangunan yang tersusun dari beberapa unsur yang saling menguatkan. Unsure-unsur yang dimaksud meliputi *tauhid*, *'adl*, *nubuwwah*, *khilafah*, dan *ma'ad* yang disangga secara lebih kuat oleh tiga tiang penyangga (*multitype ownership*, *freedom to act*, *social justice*), serta dengan satu atap (akhlak). Secara umum prinsip-prinsip ekonomi Islam dibagi menjadi tiga kelompok besar. Masing-masing kelompok

²⁹ Ibid, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, hlm. 45

besar ini membentuk suatu bangunan yang akan menjadi prinsip ekonomi Islam.³⁰

Bagian pertama, adalah lima universal yang menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam, adalah sebagai berikut:

- a) *Tauhid* (Keesaan Tuhan), merupakan pondasi ajaran Islam. Secara umum tauhid dipahami sebagai sebuah ungkapan keyakinan (syahadat) seorang muslim atas keesaan Tuhan.
- b) *'Adl* (Keadilan), Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud disini adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- c) *Nubuwwah* (Kenabian), setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat nabi Muhammad SAW untuk diterapkan dalam kehidupann sehari-hari, khususnya dalam bidang ekonomi yaitu *siddiq* (benar, jujur), *amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), *fathanah* (kecerdikan,

³⁰ Taqiyudin An-Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternative Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah, 1996), hlm. 59

kebijaksanaan, intelektual), dan *tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).

- d) *Khilafah*, (Pemerintahan), dalam Islam pemerintahan memainkan peranan kecil tapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah memastikan bahwa perekonomian suatu Negara berjalan dengan baik sesuai dengan syari'ah dan untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak asasi.
- e) *Ma'ad* (hasil). Imam Ghazali menyatakan bahwa motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan/profit/laba baik laba material maupun non material.

Bagian kedua, adalah prinsip-prinsip *derivative* yang merupakan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam yang juga menjadi tiang ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a) *Multitype ownership* (kepemilikan *multijenis*) yaitu turunan dari nilai tauhid dan adil. Dalam ekonomi Islam kepemilikan swasta atau pribadi tetap diakui, tetapi cabang-cabang produksi yang strategis dapat dikuasai oleh Negara, guna menjamin adanya keadilan.
- b) *Freedom to act* (kebebasan bertindak atau berusaha) merupakan turunan dari nilai

nubuwwah, adil dan khilafah. Prinsip ini akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena setiap individu bebas untuk bermuamalah.

- c) *Social justice* (keadilan sosial) merupakan turunan dari nilai *khilafah dan ma'ad*. Dalam Ekonomi Islam pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara kaya dan miskin.

Bagian ketiga adalah akhlak. Toeri ekonomi Islam dan sistemnya belumlah cukup tanpa adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai akhlak. Kinerja suatu bisnis atau ekonomi tidaklah bergantung kepada teori dan sistemnya saja, melainkan pada *manbehind the gun*-nya. Oleh karena itu, akhlak menjadi bagian ketiga dan merupakan atap yang menaungi ekonomi Islam.³¹

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan pembahasan dengan penelitian yang telah dibuat oleh orang lain, maka penulis menyajikan beberapa penelitian yang telah dibuat oleh para penulis lain, yaitu:

1. Penelitian yang berjudul “Peran Industri Rumah Tangga (*Home Industri*) Pada Usaha Kerupuk Terigu Terhadap Pendapatan Keluarga Di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.” Karya Syahdan &

³¹ Ibid, *Membangun Sistem EKonomi Alternative Perspektif Islam*, hlm. 61

Husnan.³² Dari hasil penelitian bahwa usaha kerupuk terigu memiliki peran dalam perolehan pendapatan keluarga di Kecamatan Sakra Lombok Timur. Hal ini sesuai dengan hasil pendapatan rata-rata ibu rumah tangga sebesar Rp. 1.110.675/bulan.

2. Penelitian yang berjudul “Peranan Industri Kecil Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Kasus Pada Industri Kerajinan Batik Kayu di Dusun Kreet, Sendangsari, Pajangan, Bantul). Karya Josephine Wuri & Yuliana Rini Hardanti.³³ Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai produksi adalah variabel yang paling menentukan tingkat keuntungan perajin yang merupakan proksi dari keberhasilan usaha. Dengan semakin berhasilnya usaha berarti tingkat pendapatan perajin akan meningkat. Oleh karena itu sebaiknya setiap perajin berusaha meningkatkan produksinya.
3. Penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Home Industry dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat”. Karya Fahmi Riyansyah dkk.³⁴ Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak perkembangan *home industry* terhadap masyarakat salah satunya mengurangi pengangguran, terbukanya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan ekonomi dengan indikator yaitu menyekolahkan anak, mempunyai kendaraan dan rumah lebih layak huni.

³² Syahdan & Husnan, “Peran Industri Rumah Tangga (*Home Industri*) Pada Usaha Kerupuk Terigu Terhadap Pendapatan Keluarga Di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur”. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 1 No. 1, Februari 2019, hlm. 45-63

³³ Josephine Wuri & Yuliana Rini Hardanti, “Peranan Industri Kecil Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Kasus Pada Industri Kerajinan Batik Kayu di Dusun Kreet, Sendangsari, Pajangan, Bantul)”, *Jurnal Kinerja*, Vol.10, No.2, 2006, hlm. 145-161

³⁴ Fahmi Riyansyah dkk, *Pemberdayaan Home Industry dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat*. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 87-109

4. Penelitian yang berjudul “Penguatan Ekonomi Industri Kecil dan Menengah Melalui Platfrom Klaster Industri”. Karya Etty Puji Lestari.³⁵ Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan klaster industri dan jaringan bisnis diyakini akan dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing IKM. Pembentukan klaster dan jaringan akan mengatasi keterbatasan yang dialami IKM dalam menangkap peluang pasar yang membutuhkan jumlah volume produksi yang besar, standar yang homogen, serta produksi dan distribusi yang teratur.
5. Penelitian berjudul “Peran Home Industri dalam Meningkatkan EKonomi Keluarga (*Studi Kasus Home Industri Keripik di Kelurahan Kibu Gadang*)”. Karya Riski Ananda.³⁶ Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa home industri di kelurahan Kubu Gadang sudah berjalan dengan baik karena tidak hanya ekonomi para pemilik industri saja yang meningkat akan tetapi masyarakat sekitar juga tergolong baik akan adanya home industri tersebut.

Dari kelima penelitian Syahdan & Husnan, Josephine Wuri & Yuliana Rini Hardanti, Fahmi Riyansyan dkk, Etty Puji Lestari, Riski Ananda, penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang industri kecil dan menengah, sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan kelima penelitian diatas, yaitu tentang onjek penelitian yang mendiskripsikan kondisi perekonomian masyarakat di Desa Wonorejo Kec. Sumbergempol Kabupaten

³⁵ Etty Puji Lestari, “Penguatan Ekonomi Industri Kecil dan Menengah Melalui Platfrom Klaster Industri”, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol. 6, No. 2, September 2010, hlm. 146-157

³⁶ Riski Ananda, “Peran Home Industri dalam Meningkatkan EKonomi Keluarga (*Studi Kasus Home Industri Keripik di Kelurahan Kibu Gadang*)”, Jurnal Studi Sosiologi, Vol. 3, No.2, Oktober 2016, hlm. 11

Tulungagung serta prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkan dalam industri kecil tersebut.